EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

RINA ARDIANTY FATWA

NIM. B1032221006

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TAHUN 2026

LEMBAR YURIDIS

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

Penanggung Jawab Yuridis

Rina Ardianty Fatwa
B1032221006

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 23 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., CA	6 /08/2026	
		NIP. 196808211997021003		
2.	Sekretaris Penguji	Rusliyawati, S.E., M.,Si., Ak., CA	5 /08/2026	
		NIP. 197901272002122002		
3.	Penguji 1	Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA, CFrA, CMA	4 /08/2026	
		NIP. 198207192005011001		
4.	Penguji 2	Ika Nur Azmi, S.E., M.Ak., Ak	5 /08/2026	
		NIP. 199003152023212050		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif
Pontianak, 12 AUG 2026
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197906182002122003

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama	: Rina Ardianty Fatwa
NIM	: B1032221006
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Konsentrasi	: sektor publik
Judul Proposal	: Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya peneliti sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti peneliti melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti yang dapat berakibat pada pembatalan proposal Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya

Pontianak, 10 Agustus 2025



Rina Ardianty Fatwa

NIM. B1032221006

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Nama	: Rina Ardianty Fatwa
NIM	: B1032221006
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Konsentrasi	: Sektor Publik
Tgl Ujian	: 23 Juli 2026
Judul Skripsi	: Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 10 Agustus 2026



Rina Ardianty Fatwa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak" dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memeperoleh gelar sarjana akuntansi (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan,, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara moral atau materi. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hambaNya dalam menjalani keseharian sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya. Penulis sangat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, Ya Rabb.

2. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M. Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.

3. Ibu Dr. Barkah, S. E., M. Di., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

4. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

5. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

6. Bapak Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak., CA. CPA, Asean CPA., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

7. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS, ACPA, CFrA., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

8. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

9. Bapak Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., CA menjadi Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

10. Ibu Rusliyawati. S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan ibu meluangkan waktu di tengah kesibukan, atas kesabaran, perhatian, arahan, serta nasihat yang disampaikan dengan tutur kata menenangkan dan tidak pernah menyakiti, sehingga seluruh proses bimbingan dapat dijalani dengan rasa aman dan nyaman. Setiap nasihat dan motivasi dari ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang ibu berikan.

11. Seluruh dosen di Program Studi Akuntans, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan berharga selama masa perkuliahan.

12. Seluruh staf tata usaha, perpustakaan dan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama berkuliah

13. Kepada kedua orang tua penulis Wahid Hasyim dan Dian Syahtilawati. Dua sosok yang paling berjasa di kehidupan penulis. Keduanya selalu mengusahakan agar anak-anaknya dapat menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Terima

kasih untuk Papa dan Mama yang senantiasa memberikan doa, kasih saying, dukungan, semangat, serta segala pengorbanan yang tidak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu percaya, menguatkan dan menjadi tempat untuk kembali ketika penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Setiap doa dan dukungan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu hal yang membuat Papa Mama bangga. Terima kasih telah menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan setiap proses yang telah dimulai.

14. Kakak kandung penulis, Rini Novianty anak pertama dari keluarga tercinta dan contoh teladan yang memovitavasi penulis. Terima Kasih atas segala dukungan, perhatian, semangat dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu memberikan motivasi dan menguatkan penulis ketika menghadapi berbagai kesulitan selama menyelesaikan Pendidikan. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Adik bungsu penulis, Regsha Syahvira Widianty anak terakhir dari keluarga tercinta dan penyemangat penulis agar dapat cepat menyelesaikan kuliah ini. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian dan sebagai tempat cerita ketika penulis merasa lelah. Semoga kelak kita bisa terus saling mendukung, bertumbuh bersama, dan membanggakan kedua orang tua.

16. Anabul tersayang penulis, Ciko dan Bobi terima kasih telah menjadi teman kecil yang selalu adir di setiap proses panjang dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk tingkah lucu, kehadiran dan kasih sayang sederhana yang tanpa sadar menjadi penghibur di tengah rasa lelah, stress dan banyaknya pikiran. Semoga ciko dan bobi selalu sehat, panjang umur dan tetap menjadi anabul kesayangan penulis yang selalu membawa kebahagiaan.

17. Kepada Alm.A.Syatibi dan Sumiyati, Datok dan Oma yang tercinta terima kasih atas kasih saying, doa, perhatian dan segala kebaikan yang telah Datok dan Oma berikan selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan selalu memberikan kehangatan yang tidak ternilai. Setiap doa dan dukungan dari Datok dan Oma menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam melewati setiap proses hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Oma di berikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang, untuk Datok semoga semoga diempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah.

18. Kepada seseorang yang selalu ada di samping penulis Andhika Ahmad Lawa, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih karena selalu menemani, mendukung, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan awal hingga akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertai.

19. Kepada Naura dan Odre sahabat terbaik penulis terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita penulis dari semester awal hingga akhir sekarang. Terima kasih atas dukungan dan dorongan kalian, walaupun berbeda fakultas tetapi kalian selalu ada untuk penulis. Kalian adalah salah satu bagian penting dari perjalanan ini yang membuat semuanya terasa lebih ringan untuk dijalani. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah, serta persahabatan ini tetap terjaga meski waktu terus berjalan.

20. Kepada sahabat terbaik penulis, Reyzta, Reyzti dan Anis terima kasih berkat mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis merasa sangat terbantu berkat mereka karena mereka selalu ada di kala penulis kesusahan, kebingungan, sedih dan senang. Kalian adalah salah satu bagian penting dari perjalanan ini yang membuat semuanya terasa lebih ringan untuk dijalani. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah, serta persahabatan ini tetap terjaga meski waktu terus berjalan.

21. Kepada Nayla dan Atika teman sekaligus sahabat terbaik penulis yang selalu menjadi penghibur penulis dengan tingkah lucu nya. Terima kasih karena selalu mendukung dan membantu penulis, pertemuan yang hampir setiap hari terjadi tanpa rencana menjadi penguat dalam pproses ini. Terima kasih atas kebersamaan yang sederhana selama ini semoga kita selalu bersama.

22. Kepada Ceasaria, Putri, Shovie, dan Nadila. Terima kasih sudah selalu mensupport penulis yang telah menemani langkah sejak awal perkuliahan hingga akhirnya sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan bantuan yang selalu diberikan di saat suka maupun duka. Kalian adalah salah satu bagian penting dari perjalanan ini yang membuat semuanya terasa lebih ringan untuk dijalani. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah, serta persahabatan ini tetap terjaga meski waktu terus berjalan.

23. Yang terakhir untuk diri saya sendiri sebagai penulis Rina Ardianty Fatwa terima kasih sebesar-besarnya untuk diri sendiri karena mampu bertahan dan berjuang sampai ditahap sekarang. Terima kasih atas segala usaha yang dilakukan tak pernah sia-sia, air mata yang selalu keluar di saat ingin menyerah dan doa untuk diri sendiri agar di mudahkan selama proses perkuliahan hingga skripsi ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang dan maju lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, tetap menjadi perempuan yang kuat, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa dengan yang lebih baik dan cerah.

Pontianak, 10 Agustus 2026

Rina Ardianty Fatwa

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

Rina Ardianty Fatwa

Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pontianak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Informan penelitian terdiri atas dua orang, yaitu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Inspektorat Kota Pontianak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisi menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Pemerintah Kota Pontianak telah cukup efektif. SIPD mampu mendukung proses pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menghasilkan informasi yang akurat, serta mempermudah penyusunan dan pengawasan laporan keuangan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan *server,* keterbatasan fitur, dan belum optimalnya integrasi beberapa modul. Meskipun demikian, penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama dalam menghasilkan informasi yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), efektivitas, kualitas laporan keuangan, DeLone dan McLean.

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak

Rina Ardianty Fatwa

Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura

RINGKASAN SKRIPSI

1. Latar belakang

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif sebagi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu wujud pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi yang terintegrasi, yang diharapkan mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara lebih akurat dan tepat waktu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik, pemerintah melakukan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi sistem pemerintahan yang menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pengawasan dalam pengelolaankeuangan daerah. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi agar proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkontrol. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disingkat SIPD hadir sebagai sarana kebijakan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis data dan informasi yang terintegrasi. Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Seiring dengan

diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, penting untuk menilai sejauh mana sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif utama menurut SAP, yaitu relevansi, reabilitas, komparabilitas,dan konsistensi. Relevansi mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan pada kesenjangan penelitian sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) dan Inspektorat Kota Pontianak. Peneliti ini tidak hanya menilai efektivitas penerapan (SIPD), tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis yang lebih kontekstual.

2. Rumusan masalah

Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan di Kota Pontianak.

4. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan deskriptif dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di BKAD Kota Pontianak dan Inspektorat Kota Pontianak.

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Akuntansi dan Audit Ahli Pertama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan penggunaan SIPD. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang diterapkan untuk menganalisis data sesuai dengan kerangka konseptual penelitian mengenai efektivitas penerapan sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Pontianak.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dianalisis berdasarkan enam dimensi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003), yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Pada aspek kualitas sistem, SIPD telah mampu mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan daerah sehingga mempermudah pengguna dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, masih ditemukan kendala berupa gangguan *server*, keterbatasan fitur, dan belum optimalnya integrasi beberapa modul. Pada aspek kualitas informasi, SIPD mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diperoleh sehingga membantu proses penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, kualitas informasi tetap bergantung pada ketelitian pengguna dalam melakukan input data.

Pada aspek kualitas layanan, pengguna memperoleh dukungan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. Namun, penanganan gangguan teknis masih perlu ditingkatkan karena beberapa permasalahan harus ditangani oleh pengelola sistem secara terpusat. Pada aspek **p**enggunaan, SIPD telah digunakan secara aktif sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah oleh BKAD dan juga dimanfaatkan oleh Inspektorat sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan pengawasan.

Pada aspek kepuasan pengguna, pengguna merasakan bahwa SIPD memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Namun, kepuasan pengguna belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh gangguan teknis dan kualitas layanan yang belum maksimal. Sementara itu, dari aspek manfaat bersih, penerapan SIPD memberikan manfaat nyata terhadap pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mempercepat proses penyusunan laporan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Pemerintah Kota Pontianak berada pada kondisi cukup efektif. SIPD memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui tersedianya informasi yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis dan operasional yang perlu diperbaiki.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SIPD memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak. Hal tersebut tercermin dari tersedianya informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik kualitas laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, manfaat yang dihasilkan SIPD menunjukkan bahwa sistem ini telah mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut analisis peneliti, efektivitas penerapan SIPD di Pemerintah Kota Pontianak telah menunjukkan hasil yang baik karena sistem mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan secara lebih terintegrasi dibandingkan sistem sebelumnya. Namun, efektivitas tersebut masih berada pada kategori "cukup efektif", bukan "sepenuhnya efektif", karena masih terdapat beberapa kendala teknis dan operasional yang memengaruhi pemanfaatan sistem. Meskipun

demikian, manfaat yang dihasilkan SIPD telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan SIPD berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun masih diperlukan berbagai upaya penyempurnaan agar implementasinya semakin optimal.

7. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak diharapkan terus meningkatkan kualitas penerapan SIPD melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya peningkatan kapasitas *server*, penyempurnaan fitur aplikasi, dan pengembangan integrasi antar modul. Selain itu, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi pengguna perlu terus dilakukan agar pemanfaatan SIPD semakin optimal.

2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

BKAD diharapkan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas data yang diinput ke dalam SIPD. Ketelitian dalam proses pencatatan dan rekonsiliasi data akan mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Bagi Inspektorat Kota Pontianak

Inspektorat diharapkan terus mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sebagai sarana monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan data yang tersedia dalam SIPD secara maksimal akan memperkuat fungsi pengawasan serta mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Bagi Kementerian Dalam Negeri

Sebagai pengembang SIPD, Kementerian Dalam Negeri diharapkan terus melakukan penyempurnaan sistem melalui peningkatan stabilitas *server*, percepatan penanganan gangguan teknis, serta pengembangan fitur yang lebih

sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah agar implementasi SIPD dapat berjalan secara lebih efektif.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi SIPD dengan melibatkan lebih banyak perangkat daerah atau membandingkan penerapan SIPD pada beberapa pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dapat dipertimbangkan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK vii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL 16
DAFTAR GAMBAR 17
BAB 1 18
PENDAHULUAN 18
1.1 Latar Belakang 18
1.2 Rumusan Masalah 26
1.3 Tujuan Penelitian 26
1.4 Kontribusi Penelitian 26
1.4.1 Kontribusi Penelitian Teoritis 26
1.4.2 Kontribusi Praktis 27
1.5 Gambaran Konsep Penelitian 28
BAB II 31
TINJAUAN PUSTAKA 31
2.1 Landasan Teori 31
2.1.1 Teori Kesuksesan Sistem Informasi (DeLone & McLean) 31
2.1.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 32
2.1.3 Konsep Efektivitas 34
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 35
2.2 Kajian Impiris 36
2.3 Kerangka Konseptual 44
BAB III 47
METODE PENELITIAN 47
3.1 Metode dan Desain Penelitian 47
3.2 Lokasi Penelitian 48
3.3 Subjek Penelitian 48
3.4 Teknik Pengumpulan Data 48
3.5 Teknik Analisis Data 50
BAB IV 52

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
4.1.1 Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak 53
4.1.2 Profil Inspektorat Kota Pontianak 53
4.1.3 Keterkaitan BKAD, Inspektorat dan SIPD 54
4.2 Hasil Penelitian 54
4.2.1 Kualitas Sistem 55
4.2.2 Kualitas Informasi 57
4.2.3 Kualitas Layanan 59
4.2.4 Penggunaan 61
4.2.5 Kepuasan Pengguna 63
4.2.6 Manfaat Bersih 65
4.3 Pembahasan 67
4.3.1 Efektivitas Penerapan SIPD ditinjau dari Kualitas Sistem 67
4.3.2 Efektivitas Penerapan SIPD Ditinjau dari Kualitas Informasi 69
4.3.3 Efektivitas Penerapan SIPD Ditinjau dari Kualitas Layanan 71
4.3.4 Efektivitas Penerapan SIPD Ditinjau Dari Pengguna Sistem 74
4.3.5 Efektivitas Penerapan SIPD Ditinjau dari Kepuasan Pengguna 76
4.3.6 Efektivitas Penerapan SIPD Ditinjau dari Manfaat Bersih terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak 79
4.3.7 Analisis Keseluruhan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak 82
BAB V 86
PENUTUP 86
5.1 Kesimpulan 86
5.2 Saran 87
5.3 Keterbatasan Penelitian 88
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN **94**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu… 27

D

AFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SIPD… 8

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 33

BAB 1
PENDAHULUAN

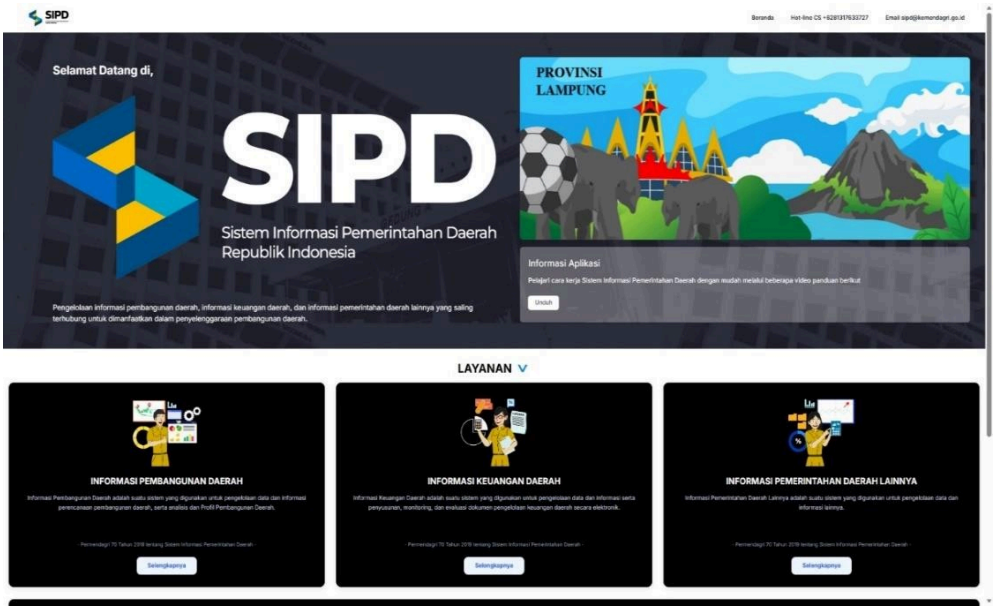
1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif sebagi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu wujud pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi yang terintegrasi, yang diharapkan mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara lebih akurat dan tepat waktu.

Sejak diperkenalkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, berbagai instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, mulai mengadopsi langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan pemerintah. Langkah ini mendapatkan dorongan signifikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi dasar penting dalam menerapkan revolusi industry 4.0 dalam pemerintahan (Fitrohtil et al., 2024). Dengan adanya peraturan SPBE, pemerintah telah memberikan pilar yang kuat untuk transformasi digital dalam administrasi publik. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE dan meningkatkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan, di perlukan koordinasi data yang baik antar instansi pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik, pemerintah melakukan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi sistem pemerintahan yang menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem

informasi yang terintegrasi agar proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkontrol. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disingkat SIPD hadir sebagai sarana kebijakan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis data dan informasi yang terintegrasi. Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah (Nadir et al., 2023).



Gambar 1.1 SIPD

Bersamaan dengan keluarnya Permendagri No. 77 Tahun 2020, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menggantikan aplikasi SIMDA. Pedoman

pengelolaan keuangan daerah sebelumnya dituangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, namun dokumen ini telah digantikan oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020. Berbeda dengan SIMDA yang tidak memiliki pemerintah daerah informasi terkait kepada masyarakat luas melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terpusat (Paat dkk, 2023). Tujuan kebijakan penerapan SIPD adalah untuk meningkatkan kebijakan di semua tingkat pemerintahan melalui akses yang lebih baik ke pemanfaatan data sistem informasi dan pembangunan.

Seiring dengan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, penting untuk menilai sejauh mana sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Dewi & Muhammad, 2023) Penerapan Kebijakan SIPD ini tidak lepas karen penyelenggaraan pemerintah daerah yang aktif, sehingga kebutuhan akan sistem informasi yang berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntanbilitas dan transparasi pemerintah sangat dibutuhkan, karena merupakan salah satu bentuk dari *Open Government* Indonesia (OGI) dan perubahan pola kerja yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dari revolusi industri 4.0.

Sejalan dengan penelitan (Fachruddin, 2025) dengan adanya SIPD proses penyusunan anggaran menjadi lebih sistematis, meminimalisir kesalahan manusia (*Human error*), serta meningkatkan keterpaduan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi sistem ini.

Fenomena serupa juga ditemukan di Kota Pontianak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Deseverians & Wulandari, 2024.) penerapan Sistem Informasi Pemerintah Saerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kota Pontianak menunjukkan tingkat efektivitas yang masih rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sistem hanya mencapai persentase

sebesar 48,26% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Temuan ini

menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan sebagai sistem informasi yang terintegrasi, namun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Efektivitas penerapan SIPD tidak hanya mempengaruhi proses administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khusunya pada Badan keuangan dan Aset daerah (BKAD) kota pontianak. Selain itu, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga memiliki keterkaitan dengan penerapan SIPD dan kualitas laporan keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan audit internal, inspektorat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk menilai keandalan informasi yang dihasilkan melalui SIPD. Efektivitas penggunaan SIPD dapat mempermudah proses audit karena data keuangan tersimpan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Sebaliknya, apabila terdapat kendala dalam penerapan SIPD, hal tersebut dapat berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dan berpotensi menimbulkan temuan dalam proses audit. Dengan, demikian, pandangan inspektorat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan SIPD mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang beekualitas pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Hubungan antara efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki fungsi pengawasan, audit, dan reviu terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Handayani dan Supriatna, 2025) menemukan bahwa penerapa SIPD dan peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa sistem

informasi yang baik perlu didukung oleh fungsi pengawasan yang efektif agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, (Sarmento Giam & Otniel Rondonuwu, 2022) menjelaskan bahwa inspektorat sebagai APIP memiliki kewajiban melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, efektivitas penerapan SIPD tidak hanyak berdampak pada proses penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mempengaruhi kemudahan inspektorat dalam melakasankan fungsi pengawasan dan reviu. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, data keuangan menjadi lebih mudah ditelusuri, diverifikasi dan dievaluasi sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sangat penting karena keberhasilan pengelolaan keuangan publik bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Pasal 391 dan 395 dari undang- undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan daerah.

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah perlu dikaitkan dengan landasan hukum yang mengatur prinsip, mekanisme dan tujuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang menegaskan perlunya sistem yang efektif dan terintegrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah (peraturan.bpk.go.id). Efektivitas suatu sistem tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut dapat digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan peningkatan efektivitas sistem pemerintah dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintah daerah (SIPD), sebagai wujud dari *e-government* di bidang pengelolaan keuangan daerah, mampu

memberikan kontribusi positif terhadap, efisiensi, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas diharapakan dapat menunjukan sejauh mana SIPD mampu membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan, yaitu tersedianya informasi keuangan yang akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan. Dengan sistem yang terintegrasi, SIPD diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan konsistensi data, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan daerah. Namun, efektivitas penerapan SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem secara formal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Efektivitas penerapan SIPD menjadi aspek krusial secara langsung berkaitan dengan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam proses penyususnan laporan keuangan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu instrument penting dalam mewujudkan akuntabilitas public, karena melalui laporan keuangan tersebut masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif utama menurut SAP, yaitu relevansi, reabilitas, komparabilitas,dan konsistensi. Relevansi mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Reabilitas berarti informasi keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material, dapat diverifikasi dan menggambarkan kondisi sebenarnya. Komparabilitas menekankan bahwa laporan keuangan harus dapat dibandingkan antarperiode maupun

anatrentitas, sehingga mendukung transparansi evaluasi kinerja. Sementara itu, konsistensi menuntut penerapan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu, agar informasi keuangan mudah dipahami dan digunakan (PP No 71 Tahun 2010). Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara wajar.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku agar pelaporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan dari entitas lain. Penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas akan menggambarkan keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerahnya. Laporan keuangan memberikan informasi aktivitas transaksi pemerintah yang dilakukan oleh suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan berguna dalam rangka proses pembuatan keputusan baik itu dalam bidang sosial, ekonomi dan politik karena dapat memberikan informasi mengenai sumber, pengalokasian dan penggunaan sumber daya keuangan (Muhammad Ilal Hamdi, n.d.)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Penerapan Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang belum terjawab secara komprehensif. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada evaluasi penerapan SIPD dari aspek kepuasan pengguna, kesiapan sumber daya manusia, kendala teknis sistem, serta efektivitas proses administrasi keuangan daerah. Penelitian umumnya belum mengaitkan efektivitas penerapan SIPD secara langsung dengan kualitas laporan keuangan sebagai output utama dari pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian (Nalle,2023.) menemukan bahwa penggunaan SIPD di daerah Kabupaten Kupang belum efektif karena masih ada kendala dalam penatausahaan keuangan. Penyebabnya adalah sosilisasi penggunaan SIPD belum berjalan dengan baik anatara unit pengguna SIPD di daerah. Hal yang sama ditemukan oleh (Wasiatun hasanah et al., 2025)dalam penelitiannya permasalahan dalam implementasi SIPD juga terjadi di Badan Keuangan Aset Daerah dan Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan keuangan daerah di BKAD tersebut masih dianggap kurang efektif, terlihat dari berbagai kendala yang dihadapi, seperti belum tersedianya fitur-fitur yang dibutuhkan di setiap bidang. Selain itu sering terjadi masalah teknis, termasuk kesulitan dalam mengakses aplikasi SIPD, *server* yang sering mengalami kesalahn dan jaringan *server* yang terkadang macet atau memerlukan waktu lama untuk memuat. Peneliti lain oleh (Mahaputra & Yamin, 2020.)menjelaskan menurut analisis dengan poin kualitas dengan mencakup klasifikasi yang mampu dipahami, andal, relevan serta mampu dibandingkan mengenai SIPD sudah terbilang efektif.

Selain itu, penilaian kualitas laporan keuangan dalam peneliti terdahulu cenderung dilakukan secara umum atau hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan auditor, tanpa mengkaji secara spesifik karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu relevansi, keandalan, ketepatan waktu dan komparabilitas. Akibatnya, hubungan antara efektivitas penerapan SIPD dan peningkatan kualitas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah belum tergambar jelas.

Pada peneliatan sebelumnya mengenai SIPD menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum mampu menggali secara mendalam pengalaman langsung pengguna SIPD dalam praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Padahal, pemahaman terhadap pengalaman pengguna sangat penting untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem dijalankan secara nyata, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan SIPD di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada kesenjangan penelitian sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) dan Inspektorat Kota Pontianak. Peneliti ini tidak hanya menilai efektivitas penerapan (SIPD), tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis yang lebih kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kualitas laporan keuangan pada daerah Kota Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan di Kota Pontianak.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Penelitian Teoritis

A. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori – teori administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan peran teknologi informasi dalam pemerintahan daerah. Dengan mempelajari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran, penelitian ini akan memberikan wawasan baru

mengenai bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan daerah.

B. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks penerapan teknologi informasi. Dengan mengkaji penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penelitian ini akan menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan anggaran daerah yang optimal.

C. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sistem informasi dalam konteks pemerintahan daerah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Studi ini juga menguji hubungan antara penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan kinerja pengelolaan anggaran, yang memperkaya kajian tentang sistem informasi dalam konteks administrasi pemerintahan

1.4.2 Kontribusi Praktis

A. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah daerah, khususnya BKAD Kota Pontianak dan Inspektorat Kota Pontianak, untuk menilai sejauh mana penerapan SIPD telah mencapai tujuan yang optimal. Penelitian ini memberikan gambaran tentang keunggulan dan kekurangan sistem yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan.

B. Penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah lainnya yang ingin menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan kesuksesan yang mungkin dihadapi selama penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BKAD dan Inspektorat Kota Pontianak sehingga bisa mempercepat proses adopsi dan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di daerah lain.

C. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai bagaimana

pengelolaan keuangan dapat lebih efektif dan efisien dengan penggunaan aplikasi

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini juga dapat memberikan saran terkait pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan sistem ini.

D. Salah satu manfaat praktis lainnya adalah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memengaruhi pengelolaan keuangan daerah penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan yang mendukung transparansi dan pencegahan penyalahgunaan anggaran di tingkat pemerintahan pusat.

E. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi pengelola atau pengembang aplikasi pemerintahan daerah untuk mengetahui kelemahan pada aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil dari penelitian dapat membantu mereka memperbaiki fungsi aplikasi itu sendiri sehingga lebih mampu menunjang kebutuhan pengelola keuangan untuk lebih menyesuaikan kebutuhan informasi keuangan yang dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Gambaran Konsep Penelitian

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Inspektorat Kota Pontianak . Gambaran konsep penelitian berfungsi sebagai kerangka pemikiran yang menjelaskan alur hubungan antara penerapan sistem informasi, kualitas laporan keuangan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Gambaran penelitian ini, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diposisikan sebagai variabel utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Efektivitas penerapan SIPD dianalisis berdasarkan kemampuan sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tingkat integrasi antarproses pengelolaan keuangan, serta kemampuan adaptasi

pengguna terhadap

perubahan sistem. Penilaian efektivitas tersebut merujuk pada teori efektivitas organisasi dan teori sistem informasi, yang menekankan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Sementara itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi fokus utama sebagai variabel terikat. Penilaian kualitas laporan keuangan mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi aspek relevan, keandalan, ketepatan waktu, dan kemampuan untuk dibandingkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SIPD, guna mengetahui sejauh mana sistem ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pelaporan keuangan daerah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah menggunakan SIPD dalam periode setelah sistem diterapkan hingga kondisi terbaru. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengoperasian SIPD, khususnya pada bidang keuangan dan akuntansi, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan pengalaman nyata pengguna sistem dalam praktik sehari-hari.

Selain menganalisis hubungan antara penerapan SIPD dan kualitas laporan keuangan, penelitian ini juga menelaah berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan SIPD. Faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi sumber daya manusia, dukungan pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem. Faktor pendukung dan penghambat tersebut dianalisis untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala penerapan SIPD di Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Melalui gambaran konsep penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Konsep penelitian ini juga menjadi dasar dalam merumuskan analisis dan rekomendasi yang bertujuan untuk memperkuat

transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di Kota Pontianak.